

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA  
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A WIROGUNAN**



**Diajukan oleh :**

**Debby Artauli Habeahan**

<b>NPM</b>	<b>: 120510936</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan Pidana</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA  
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A WIROGUNAN**



**Disusun oleh:**

**Debby Artauli Habeahan**

**NPM : 120510936**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H, M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Ex. Endro Susilo S.H.,LL.M.**

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A WIROGUNAN

Debby Artauli Habeahan,  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email: [debbyarta23@gmail.com](mailto:debbyarta23@gmail.com)

## ABSTRACT

*Narcotics inside Correctional Facility develops and increases significantly. The nature of Correctional Facility is to serve sentences by development and rehabilitation in order to improve convict's self. In reality, convicts tend to repeat their crimes to circulate drugs with the involvement of the facility guards. The purpose of this research is to know how law enforcement to drug convicts at Wirogunan Correctional Facility. The approach of this study is normative. The respondents are The Head of Development Section and targeted person. The result of this study reveals that convict and facility guard that involved in drug circulation inside the facility receive sanctions.*

*(Key Words: Law, Correctional Facility, Drugs, Convicts)*

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat/ obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Artinya bahwa peredaran narkotika hanya dapat digunakan khusus untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diijinkan oleh Menteri. Jadi jelaslah bahwa peredaran narkotika selain untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan, merupakan peredaran gelap narkotika/ ilegal atau merupakan suatu Tindak Pidana, yaitu menurut Vos yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah suatu

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>1</sup>

Menurut mantan Menkuham, Amir Syamsudin, “peredaran gelap narkoba mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan”. Berdasarkan survey BNN yang bekerja sama dengan Puslitkes UI (Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia) “Pada semester pertama tahun 2013, jumlah pengguna narkoba mencapai 4 juta jiwa, dan di akhir tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 5,8 juta jiwa”<sup>2</sup>. Meluasnya tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia khususnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) semakin mencerminkan bahwa Indonesia tidak lagi mencerminkan Negara Hukum, karena tidak adanya keadilan dan ketertiban sebagai dasar perlindungan. Penegakan Hukum terhadap kejahatan Narkoba haruslah dilaksanakan dengan tegas, sungguh-sungguh, cepat, mengingat demi terciptanya keamanan, ketertiban bagi warga negara sebagai perwujudan norma hukum. Sebagaimana dijelaskan menurut

Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>3</sup>. Begitu juga lemahnya hukum dan aparat penegak hukum menjadikan kurang tegasnya pemberantasan narkoba dilakukan. Sanksi yang terdapat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba begitu tegas dibuat akan tetapi pada praktiknya, masih saja tidak ada kesesuaian antara orang yang melakukan tindak pidana narkoba dengan sanksi yang diberikan khususnya bagi pengedar narkoba. Kenyataan yang ada ialah, pasal yang termuat tidak semuanya dijalankan dengan sungguh-sungguh bagi pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, ikut terlibatnya petugas lapas/ sipir dalam pengendalian narkoba di dalam lapas, mengingat status dan kedudukan mereka ialah salah satu pejabat yang berwenang untuk memberikan pembinaan kepada narapidana/ tahanan agar dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, tetapi dalam kenyataannya masih saja sipir lapas terjerumus dalam pengendalian narkoba. Diketahui bahwa Lapas

<sup>1</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

<sup>2</sup> <http://www.kemenkuham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkoba-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.ZeRbVWa.dpuf>.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta

merupakan lembaga yang mempunyai sistem pengawasan yang ketat serta tempat untuk membina warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari pernyataan mengenai Lapas tersebut, seharusnya tidak ada tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala mengatakan, peredaran narkoba di dalam penjara sudah menjadi masalah akut. Adrianus menjelaskan, peredaran narkoba di dalam Lapas seperti memiliki sistem sendiri, padahal jika dipandang sederhana, Cuma ada dua jawaban tepat, bagaimana narkoba bisa ada di tempat yang seharusnya tertutup buat barang haram tersebut. Pertama, yaitu kecolongan dan yang kedua ialah memang diberi izin atau dibiarkan. Peredaran narkoba dijadikan mesin ATM oleh sipir/petugas lapas, menjadi sumber mendapatkan uang<sup>4</sup>. Dari ilustrasi permasalahan seperti yang diuraikan

diatas, maka layak untuk dikaji mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan

## 2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu, penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan analisis data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan peraturan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkotika di masyarakat, baik pemakai, pecandu, pengedar, maupun prekursor

<sup>4</sup><http://www.beritasatu.com/nasional/40858-kriminolog-peredaran-narkoba-di-lapas-masalah-akut.html>

narkotika semakin meningkat. Kenyataan ini mendorong pemerintah semakin gencar dalam hal memberantas narkotika serta menghukum mereka yang terlibat dalam hal penyalahgunaan atau peredaran narkotika.

Dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana ialah:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Setiap unsur tersebut merupakan suatu kesatuan dan menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam membuktikan ada atau tidak terjadinya suatu pelanggaran hukum khusus nya tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan yang dibentuk mengenai larangan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya peredaran narkotika tidak membuat jera orang untuk menggunakan obat terlarang tersebut, justru semakin diminati oleh masyarakat luas, baik anak-anak maupun orang dewasa. Penyalahgunaan Narkotika maupun Peredaran Narkotika tidak hanya dilakukan oleh mereka yang hidup di luar sel, tetapi juga oleh narapidana yang berada di dalam sel, di jeruji besi, bahkan narkotika masih bisa dikendalikan oleh narapidana dan sipir/ petugas Lapas.

Penelitian yang penulis lakukan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lapas Klas II A Wirogunan, menunjukan bahwa tindak pidana peredaran narkotika masih bisa dikendalikan dari dalam Lapas, bahwa terdapat 1 (satu) kasus peredaran narkotika yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2015, yang melibatkan seorang warga binaan berinisial AG, dan seorang sipir yang berinisial HF

sebagai kurir. Pada saat penangkapan, ditemukan jenis Narkotika Golongan I yaitu berupa Ganja seberat 43 gram. Kasus tersebut penulis dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Herianto selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Peredaran Narkotika di dalam Lapas merupakan suatu pelanggaran hukum, yang merupakan bentuk larangan seperti yang tertulis di dalam Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan, yaitu: menyimpan, membawa, ,mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obat lain yang berbahaya dan harus dikenakan sanksi yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan, yaitu: Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat, jika melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (7). Selain hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana/ tahanan yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika, yaitu hukuman berupa sanksi pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu bisa berupa sanksi

pidana penjara, pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana denda.

Berdasarkan kasus yang terjadi di dalam Lapas Klas II A Wirogunan, Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika di Lapas Klas II A Wirogunan, ialah:

- a. memberlakukan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan, meliputi:
  - 1) Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 hari.
  - 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- b. Memberlakukan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 111 ayat 1, narapidana AG dijatuhi sanksi pidana penjara selama 10 bulan dan sipir/ petugas Lapas dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 tahun.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pejabat yang



berwenang terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Lapas Klas II A Wirogunan sudah sesuai dengan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, artinya dalam kasus yang terjadi di dalam Lapas tersebut, narapidana AG dikenakan sanksi berupa kehilangan hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga dan dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 hari. Sanksi yang diberikan sudah benar diberlakukan dan dijalankan oleh narapidana tersebut dan juga sipir/ petugas lapas HF, yang diberhentikan sementara oleh Kepala Lapas. Selain memberlakukan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pasal 9 ayat 4 No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan, diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam kasus tersebut, pelaku tindak pidana peredaran narkotika dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 111, hanya saja kekurangan nya

adalah, pidana penjara yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut seharusnya dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 114, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini yang membuat rancu dalam pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang dengan praktiknya. Analisis mengenai pengaturan tersebut dengan kenyataan nya ialah, Jaksa Penuntut Umum dalam hal menuntut terdakwa, kebanyakan menggunakan pasal 111 dalam tindak pidana narkotika, baik itu pelaku nya sebagai pecandu, maupun pengedar narkotika. Dan putusan yang diberikan juga tidak maksimal kepada sipir lapas yaitu pidana penjara ringan yaitu 1 tahun, mengingat status dan kedudukan sipir/ petugas



lapas sebagai orang yang melakukan pembinaan terhadap narapidana/ tahanan agar menjadi manusia yang lebih baik, bukan untuk memberi peluang kepada narapidana agar melakukan tindak pidana kembali. Selain sanksi yang diberikan untuk meminimalisir kejahatan narkoba di dalam Lapas, diadakannya upaya pencegahan untuk mencegah tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lapas Klas II A Wirogunan, yaitu:

- a. Memberikan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
- b. Memasang Banner Narkoba di sepanjang blok
- c. Mengadakan Operasi Penggeledahan

Bertolak dari 3 (tiga) upaya pencegahan peredaran narkoba di dalam Lapas Wirogunan, upaya tersebut berhasil membantu petugas Lapas dalam melakukan penegakan hukum baik terhadap narapidana maupun sipir yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lapas, dan dengan upaya tersebut, tindak pidana peredaran narkoba di Lapas Klas II A Wirogunan hanya terdapat 1 kasus, itu artinya kinerja petugas lapas

sudah dapat dikatakan cukup memuaskan.

#### 4. KESIMPULAN

Pasal 55 ayat 1 KUHP menjelaskan, yang dimaksud dengan Pelaku Tindak Pidana ialah barangsiapa yang melaksanakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam kaitannya dengan peredaran narkoba, ialah yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana peredaran narkoba adalah, orang

yang melakukan peredaran narkoba, penyerahan narkoba, baik yang dilakukan sendiri, menyuruh orang lain melakukan, yang turut serta, maupun orang yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan peredaran narkoba. Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba yang terdapat di dalam Lapas Klas II A Wirogunan terdiri dari narapidana, dan sipir/ petugas Lapas. Dalam hal ini, Penegakan Hukum yang dilakukan adalah, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan sanksi pidana penjara terhadap narapidana dan sipir/petugas lapas dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan yaitu berupa penjatuan sanksi administratif terhadap narapidana. Dalam penjatuan sanksi yang mengacu pada Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tidak efektif karena ketidaksesuaian pasal yang diberikan. Sebaiknya bagi pelaku tindak pidana khususnya pengedar, diberlakukannya Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## 5. REFRENSI

### Buku

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan

### Website

<http://www.kemenkuham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkoba-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.ZeRbVWa.dpuf>.

<http://www.beritasatu.com/nasional/40858-kriminolog-peredaran-narkoba-di-lapas-masalah-akut.html>